

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang no 6 tahun 2014 menyatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didirikan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, untuk mengelola aset desa dan jasa layanan, serta usaha lainnya yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat desa. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam pendirian dan manajemen BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan memaksimalkan penggunaan aset-aset desa yang dimiliki, membangun ekonomi desa, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hasil uji petik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 8.220 BUMDes, menghasilkan 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, 1.670 BUMDes belum memberikan pemasukan pada pendapatan asli desa (PADes), 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan keuangan, 871 BUMDes pendiriannya belum didukung dengan analisis atau studi kelayakan usaha, dan 864 BUMDes belum tertib pada administrasi penatausahaan dan pelaporan BUMDes. Selain itu, 585 BUMDes belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan 547 BUMDes bidang usaha yang dimiliki belum sesuai dengan potensi desa (CNNIndonesia, 2019)

Hubungan keagenan adalah sebuah perjanjian dalam bentuk penugasan tanggung jawab, dalam pengambilan keputusan telah diberikan oleh pihak prinsipal kepada pihak agen (Jensen & Meckling, 1976). Pada konteks badan usaha, prinsipal yaitu pihak yang memberikan tanggungjawab kepada agen untuk bekerja atas nama prinsipal, sedangkan agen bertindak sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Kaitan teori agensi pada penelitian ini adalah terletak pada hubungan *principle* dan *agen*. *Principle* dalam hal ini adalah masyarakat desa dan pemerintah desa yang membuat

kebijakan atas pemberian dan pengelolaan dana desa untuk pengelolaan BUMDes, sedangkan *agen* adalah pengurus BUMDes.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan akuntabilitas merupakan keharusan melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola organisasi, untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau disusun dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas dalam BUMDes diperlukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan BUMDes untuk mencapai misi dan tujuan BUMDes yang telah direncanakan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala atau tahunan dan disampaikan pada musyawarah desa. BUMDes berfungsi sebagai penggerak ekonomi pedesaan, organisasi yang membantu menambah Pendapatan Asli Desa, serta alat untuk membantu peningkatan kemakmuran masyarakat desa.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahmudah (2019) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa desa Sungon Legowo Bungah Gresik. Hasil dari penelitian laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP belum mampu disajikan. Hasil lain dari penelitian ini sistem pengendalian internal masih terlalu lemah karena pengurus BUMDes seorang pekerja yang memiliki tanggung jawab di tempat lain. Dwidiyantini dkk. (2017) juga melakukan penelitian tentang Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur pada BUMDes Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan BUMDes Tugu Sari Pajahan hanya menyusun laporan laba rugi dengan format laporan laba rugi jasa dan laporan modal, dimana format ini diperoleh berdasarkan keahlian ketua BUMDes Tugu Sari yang hanya mengerti akuntansi dengan sederhana. Namun secara teori kegunaan informasi laporan keuangan yang dibuat BUMDes sudah mencakup unsur relevan, andal, dapat dipahami dan kelengkapan. Hasil lain dari penelitian ini proses pertanggungjawaban laporan keuangan dilaksanakan akhir tahun, dan merupakan kesepakatan yang disetujui dalam anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga BUMDes Tugu Sari Pajahan. Walaupun laporan keuangan yang dibuat sederhana dan tidak sesuai dengan format laporan keuangan manufaktur akan tetapi masyarakat sudah paham dan mengerti dengan laporan keuangan yang dibuat tersebut.

Lintong dkk. (2020) tentang Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Kineauan Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian Laporan keuangan belum dapat disajikan sesuai dengan standar, maka pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya. Hasil lain pada penelitian ini jika laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nugrahaningsih dkk. (2016) juga melakukan penelitian mengenai pengoptimalan Dana Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa untuk mencapai desa mandiri, hasil dari penelitian tersebut BUMDes harus terus dikembangkan untuk mewujudkan desa mandiri dan pengelolaan laporan keuangan desa yang akuntabel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Anisa (2017) mengenai implementasi akuntabilitas keuangan pada pengelolaan dana desa di desa Sumberulyo, Bareng, Kauman kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa pada pada ketiga desa tersebut menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Kisnawati dkk. (2018) mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa di kecamatan Moyo hilir kabupaten Sumbawa besar. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa Besar dinilai dari aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan sudah transparan.

Penelitian Riyanto (2015) mengenai dimensi akuntabilitas keuangan desa pada pengelolaan ADD di desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan ADD sudah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada

pemerintah saja. Namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, karena ada beberapa faktor penghambat sehingga pemerintah desa terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

Hasil wawancara dan survei pendahuluan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 november 2019 terdapat 185 BUMDes yang terbentuk dari 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi, dari 185 BUMDes ada 8 BUMDes dalam kategori berkembang, 84 BUMDES dalam kategori tumbuh dan 93 BUMDes yang dalam kategori dasar atau rintisan. Kategori BUMDes tersebut dinilai dari beberapa aspek yaitu, kelembagaan, aturan atau legalitas, usaha yang dijalani oleh BUMDes, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, permodalan dan aset, serta dampak BUMDes terhadap masyarakat desa (data DPMD rekap klasifikasi BUMDes 2019). Hasil survei awal pada beberapa BUMDes yang ada di Banyuwangi akhirnya peneliti memilih BUMDes Mandiri Sejahtera desa Kampunganyar yang berada di kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki dua jenis usaha yaitu usaha dagang dan usaha jasa. BUMDes tersebut sudah berdiri sejak tahun 2015 dan termasuk BUMDes kategori tumbuh. BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki 5 unit usaha yakni wisata air terjun Jagir, wisata Japuro, BPNT, Jalinmatra dan toko Pertanian. Potensi wisata air terjun Jagir dan wisata Japuro yang seharusnya mampu menyumbangkan banyak Pendapatan Asli Desa, namun dari laporan keuangan 2019 kedua potensi wisata tersebut mengalami defisit, untuk wisata air terjun Jagir sebesar Rp 77.870.758 dan Japuro sebesar Rp 1.809.000. Sehingga proses akuntabilitas pengelolaan keuangan yang meliputi proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban menarik untuk di teliti.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan mendapatkan hasil yang berbeda, Lintong dkk. (2020), Mahmudah (2019), Nugrahaningsih dkk. (2016) , Nafidah dan Anisa (2017), Kisnawati dkk. (2018)

Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi dan akuntabel sangat dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan Dwidiyantini dkk. (2017) menghasilkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes masih sederhana dan tidak sesuai dengan format laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Riyanto (2015) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan ADD sudah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada pemerintah saja. Namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda - beda, menjadi keterkaitan peneliti untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera desa Kampunganyar, kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Sejahtera di desa Kampunganyar kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan data dengan cara studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merumuskan latar belakang permasalahan, melakukan pengumpulan data, melakukan reduksi data, melakukan *triangulasi data*, melakukan analisis pengumpulandata hasil wawancara dari kepala desa, direktur atau ketua BUMDes, sekretaris, dan bendahara BUMDes, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Pembahasan penelitian dimulai dari penjelasan pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan undang – undang atau peraturan. Setelah itu membahas proses pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Sejahtera, kemudian menganalisa

permasalahan dengan data yang ada. Setelah itu memberikan rekomendasi berdasarkan peraturan dan *standart* akuntansi yang berlaku.

## **1.6 Kontribusi Riset**

### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini membuktikan teori agensi, pengurus operasional BUMDes Mandiri Sejahtera menjalankan tanggungjawab atau wewenang berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pemerintah lainnya dalam mencapai laporan keuangan yang dihasilkan memiliki akuntabilitas yang baik, dan diterima oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Manfaat yang pertama yaitu bisa menjadi masukan atau evaluasi bagi BUMDes Mandiri Sejahtera desa Kampunganyar yang berguna untuk memperbaiki proses akuntabilitas pengelolaan keuangan. Manfaat kedua yaitu, untuk mengetahui kekurangan ataupun hambatan-hambatan yang dialami pengurus BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan.

### **1.6.3 Manfaat Kebijakan**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk pengembangan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Sejahtera untuk mencapai akuntabilitas yang baik berdasarkan peraturan atau standar akuntansi yang berlaku.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan penelitian.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai studi literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori, akuntabilitas, dan BUMDes. Bab ini juga memaparkan tentang penelitian sebelumnya tujuannya untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir pada penelitian ini.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan data dengan cara studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merumuskan latar belakang permasalahan, melakukan pengumpulan data, melakukan reduksi data, melakukan *triangulasi data*, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Pembahasan penelitian dimulai dari penjelasan pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan undang – undang atau peraturan. Setelah itu membahas proses pengelolaan keuangan BUMDes Mandiri Sejahtera, kemudian menganalisa permasalahan dengan data yang ada. Setelah itu memberikan rekomendasi berdasarkan peraturan dan *standart* akuntansi yang berlaku.

## BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya, untuk pengurus BUMDes, dan pemerintah desa.